



L A P O R A N
KUNJUNGAN BENCHMARKING
INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR-RI
KE INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

TANGGAL 6 April 2016



Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI
April 2016

BAB I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Inspektorat Utama merupakan unsur pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal. Susunan dan Kedudukan Inspektorat Utama baru dibentuk melalui Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. melakukan penataan organisasi dengan tepat, serta terwujudnya penguatan pengawasan internal sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sebagai lembaga baru, dari perubahan Eselon III menjadi eselon I, membawa banyak perubahan. Selain tata kerja, SDM dan kebijakan, tuntutan akan tugas juga mengalami banyak perubahan. Maka untuk membangun kinerja yang baik, Ittama setjen DPR RI perlu mengadakan benchmarking ke beberapa Kementerian/Lembaga/Daerah untuk mendapat masukan dari berbagi hal guna meningkatkan kapabilitas dan manajemen pengawasan.

Kementerian PUPR merupakan salah satu Kementerian yang mendapat apresiasi dari Presiden Jokowi yang telah melakukan lelang Pra-DIPA (sebesar 42%) dalam rangka percepatan penyerapan anggaran di awal 2016. Sebagai Kementerian teknis, salah satu fungsi Kementerian PUPR adalah menyelenggarakan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Itjen Kementerian PUPR telah berperan besar dalam memberikan pendampingan mulai dari pengadaan Barang/Jasa, pelaksanaan, administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari Kegiatan Benchmarking ini adalah mencari masukan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM melalui *capacity building*, juga tentang kelembagaan serta kebijakan-kebijakan pendukung lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan, pembangunan kelembagaan, pembangunan sistem pengawasan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Tujuan dari kunjungan adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang teknik pengawasan, penyusunan peraturan pendukung pengawasan, bagaimana membangun kelembagaan yang solid serta meningkatkan kapasitas auditor.

Susunan Anggota Delegasi

No	Nama	Jabatan
1.	Drs. Setyanta Nugraha, MM	Inspektur Utama
3.	Ign. Bambang Rudy Anto, SH, MH	Inspektur II
4.	Djoko Anggoro, ST	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
5.	Walidi, SIP, MAP	Kasubag Evaluasi dan pelaporan
6.	Mulyati, SE	Auditor Muda
7.	Enden Adipati Koma, SE, MAP	Auditor Muda
8.	Nurhariyani, SE,MM	Auditor Muda
9.	Susriyanto, ST, MM	Auditor Pertama
10.	Arsita Putri Winanda, SE, M.Ak	Auditor Pertama
11.	Heru Nugroho, SAB	Auditor
12.	Martiasih Susanti, SE, ME	Auditor
13.	Dyah Citra Ariwidyasari, SAB, ME	Auditor
14.	Dwi Nartami Setyorini, SE	Auditor
15.	Beny Rahbandiyosa Sabri, SE	Auditor
16.	Deni Romadon, SE	Auditor
17.	Fabrina Mustika Ekawati, S.E.	Auditor
18.	Margaretha Susanti, S.E.	Auditor
19.	Mas Riky Surya Adinegara, S.Kom.	Auditor

Jadwal Perjalanan dan Agenda Kegiatan

No	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1.	Senin, 6 April 2016	Rombongan berangkat dari	
	Pukul 08.30	Lobby Setjen DPR RI dan tiba di Kantor Itjen Kementerian PUPR pukul 09. 20	
	Pukul 10.00	Pertemuan dengan Inspektur Jenderal Kementerian PUPR yang didampingi oleh para Inspektur dan Auditor Utama serta pejabat terkait	
	Pukul 12.00	Pertemuan selesai, dilanjutkan penyerahan cinderamata dan di tutup dengan ramah tamah.	

BAB II

HASIL STUDI BANDING

Profil Inspektorat Jenderal Kementerian PU dan Perumahan Rakyat

Pelaksanaan diskusi dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat, bapak Rildo Ananda Anwar. Dalam pertemuan tersebut hadir para Inspektur, dari 5 Inspektur yang hadir ada 4 Inspektur. Pimpinan diskusi menyampaikan tentang profil pengawasan Inspektorat jenderal yang selanjutnya dijelaskan pula oleh Sekretaris dan para Inspektur.



A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 maka susunan organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dikukuhkan sebagai berikut:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal.

2. Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mencakup Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung.

3. Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi di Provinsi Pulau Jawa.

4. Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mencakup provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.

5. Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat

6. Inspektorat V

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pengaduan masyarakat yang berindikasi penyimpangan keuangan negara, pemeriksaan khusus/investigasi, reviu laporan keuangan, reviu laporan kinerja instansi pemerintah Eselon I, pemeriksaan ex officio serta pemeriksaan menyeluruh di Unit Organisasi Pusat berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku

Inspektorat I

B. Sumber Daya Manusia Itjen Kementerian PUPR

Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki tenaga akuntan dan tenaga terlatih dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk melakukan pendampingan dan revidi terhadap Laporan Keuangan yang diharapkan mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

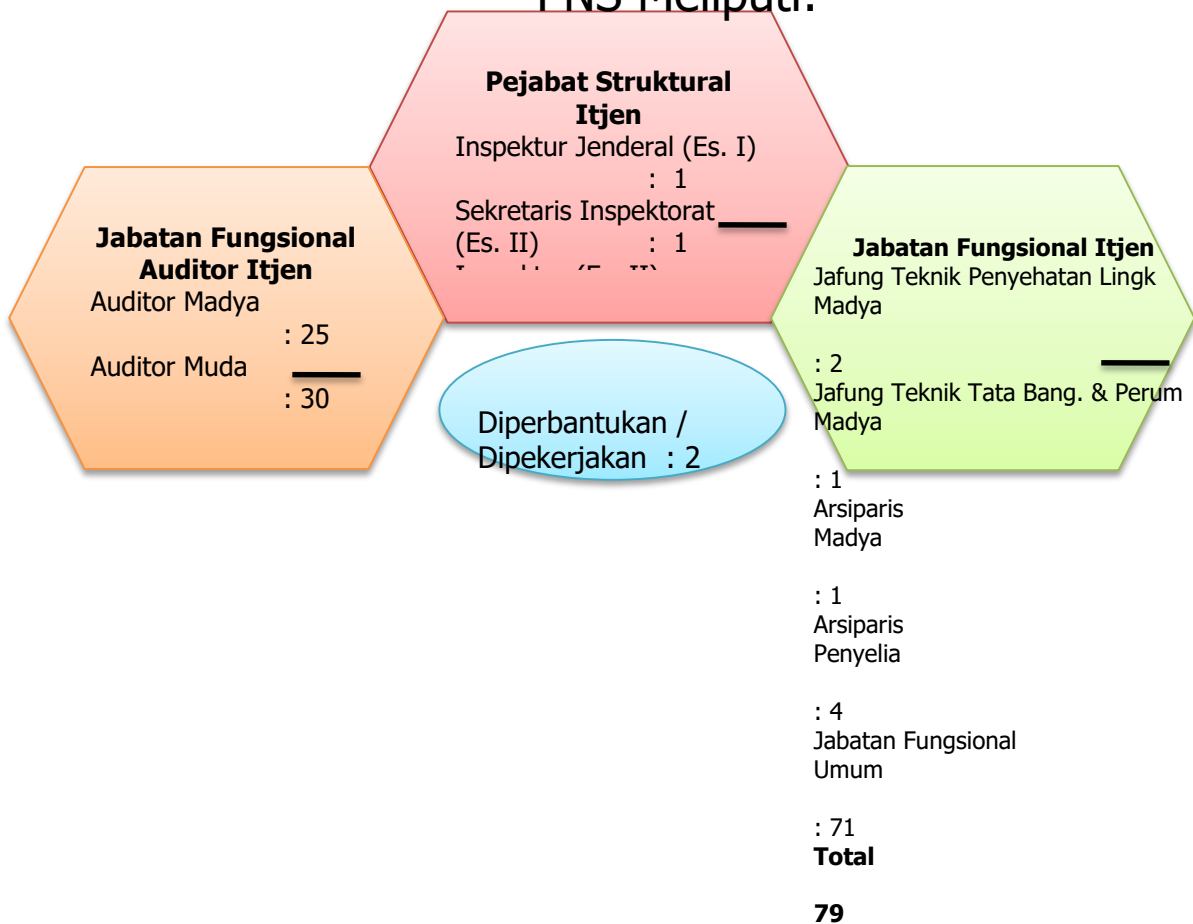
Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara periodik melakukan peningkatan kapabilitas auditor secara mandiri di lingkungan internalnya untuk meningkatkan kompetensi aparatur pengawasan. Hal tersebut dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi peraturan-peraturan baru dan pelatihan tugas serta fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang antara lain berupa bimbingan.

Total pegawai di lingkungan Itjen Kementerian PUPR adalah 304 pegawai yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS. Komposisi pegawai di lingkungan Itjen Kementerian PUPR terdiri atas 22 pejabat struktural, 153 pejabat fungsional auditor, dan 79 jabatan fungsional lain, seperti yang tergambar dalam peta SDM sebagai berikut:

PETA SDM

Pegawai Negeri Sipil :
256

PNS Meliputi:



C. Program, Sasaran, dan Indikator Anggaran Itjen Kementerian

PUPR

Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki alokasi anggaran pada tahun 20016 sebesar Rp105.813.829.000,- melalui Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mencapai sasaran strategis.

Indikator Kinerja Program antara lain:

1. Level *Internal Audit Capability Model* (IACM);

2. Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti dan tuntas serta tepat waktu; dan
3. Prosentase Jumlah Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil.

Masing-masing indikator kinerja tersebut memiliki target sebagaimana di jelaskan dalam tabel berikut:

No	Indikator Kinerja Program	Target
1	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	Level 2
2	Prosentase rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti dan tuntas tepat waktu	75%
3	Prosentase Jumlah Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil	65%

D. Kegiatan Prioritas 2016 Itjen Kementerian PUPR

1. MoU dengan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Koordinasi dan Kerjasama Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya
2. Pelaksanaan Zona Integritas pada Unit Kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian PUPR
3. Koordinasi dengan pihak Kejaksaan dalam rangka percepatan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4P)
4. Pelaksanaan Whistle Blowing System dan Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Kementerian PUPR
5. Pendampingan / Validasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit BPK-RI.
6. Peran Inspektorat Jenderal dalam Proses Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan Kementerian PUPR

E. Harapan Itjen Kementerian PUPR

Ke depan, diharapkan hasil audit Itjen Kementerian PUPR dapat dimanfaatkan untuk masukan perbaikan kinerja Kementerian PUPR, memberi perlindungan kepada pelaksana kegiatan, dan bertindak sebagai katalisator perubahan, memberikan saran atau

mendorong perbaikan untuk meningkatkan struktur dan praktek tatakelola (*catalyst for change*).

Dalam pelaksanaan audit, diharapkan ke depan Itjen kementerian PUPR dapat menerapkan Audit berbasis data atau E-Audit agar lebih efektif, efisien dan praktis, mengingat cakupan wilayah Satuan Kerja di lingkungan Kementerian PUPR begitu luas dan keterbatasan jumlah auditor. Peningkatan level 3 Internal Audit Capability Model (IACM) (Perka BPKP No. PER-1633/K/JF/2011)

BAB III

PENUTUP

Secara umum, kegiatan kunjungan studi banding atau *benchmarking* ke Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR telah terlaksana dengan baik. Inspektorat Utama telah memperoleh masukan terkait kelembagaan dan manajemen pengawasan yang dilakukan oleh APIP di lingkungan Kementerian PUPR. Beberapa hal yang dapat disimpulkan secara umum dari hasil kunjungan studi sebagai berikut.

- Secara kelembagaan Itjen Kementerian PUPR bertanggung jawab langsung kepada Menteri PUPR, sehingga dengan posisi yang demikian maka Itjen memiliki keleluasan dalam melakukan tugas dan fungsinya.
- Dalam rangka melaksanakan proyek infrastruktur prioritas guna mendorong pertumbuhan ekonomi, Kementerian PUPERA telah mengimplementasikan Program Lelang Dini atau lelang praDIPA yang diselesaikan Pengumumannya pada bulan Nopember, tanda tangan kontrak bulan Desember, dan pada bulan Januari telah dilakukan pembayaran.
- Inspektorat Jenderal Kementerian PUPERA melakukan pendampingan sejak awal kepada pelaksana proyek-proyek strategis di Kemen PUPERA, bekerjasama dengan KPK dan Kejaksaan Agung.
- Menteri PU PERA menetapkan kebijakan, bahwa proyek-proyek yang akan dilelang dengan nilai diatas Rp 100 milyar harus ada paraf Inspektur Jenderal.
- Program kegiatan pemeriksaan tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal Kementerian PUPERA disusun berdasarkan analisa berbasis resiko atau *risk base*, selalu membuat kriteria, dan telah mempertimbangkan jangkauan yang jauh.
- Komposisi pegawai di lingkungan Itjen Kementerian PUPR sebagian besar adalah auditor yang memiliki latar belakang pendidikan Insinyur, yaitu 98 %, karena audit yang dilakukan sebagian besar pada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya konstruksi.
- Inspektorat Jenderal telah mengembangkan budaya untuk membantu auditi dalam mempertanggungjawabkan, mengawasi dari awal perencanaan, sharing dan bersahabat dengan auditi, sehingga banyak auditi yang meminta pendampingan dalam setiap pekerjaannya.

Demikian laporan Kunjungan Studi Delegasi Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI ke Inspektorat jenderal Kementerian PUPR yang dilakukan pada tanggal 6 April 2016.

Jakarta, 14 April 2016

Drs. Setyanta Nugraha, MM

NIP. 19620719 198803 1 001

LAMPIRAN I



(Suasana diskusi dalam Benchmarking)



(serah terima cinderamata)



(foto bersama Rombongan Ittama Setjen DPR RI dengan jajaran Itjen Kementerian PUPR RI)

LAMPIRAN II

INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUSAHAAN

STRUKTUR ORGANISASI

